

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Indah Kurnia Pebri

NPM . 21601082212



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
MALANG**

2020

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan pertanian yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 sampel. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. (2) komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi (3) struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Kata kunci : Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Tingkat kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to determine the effect of the audit committee, independent commissioners, ownership structure on the level of compliance with related transaction disclosures based on PSAK No 7 concerning disclosure of related parties in companies registered in Indonesia stock exchange period 2017-2018. This study uses a quantitative approach. The population used in this study are mining companies and agricultural companies listed on the Indonesian stock exchange. The number of samples used in this study were 48 samples. The sample selection method uses purposive sampling. The conclusions from this study indicate that (1) the audit committee has a significant effect on the level of compliance with related transaction disclosures.(2) independent commissioners have a significant effect on the level of compliance with related transaction disclosures (3) ownership structure has no significant effect on the level of compliance with related transaction disclosures

Keywords: Audit Committee, Independent Commissioner, Ownership Structure, related party transaction disclosure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu entitas ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kinerjanya tentunya membutuhkan modal yang besar untuk melakukan ekspansi. Perusahaan akan melakukan *go public* agar mendapat tambahan dana melalui investasi, *go public* terbagi dalam sembilan sektor. *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*, sektor-sektor tersebut meliputi sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti real estate, konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas, transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Kepemilikan dari masing-masing sektor-sektor tersebut juga berbeda-beda (Harijanto 2018)

Di Indonesia, terdapat dua bentuk struktur kepemilikan, yang pertama struktur kepemilikan tersebar dan yang kedua struktur kepemilikan terkonsentrasi. Implikasi dari perbedaan kedua struktur kepemilikan ini pada pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi pemegang saham pengendali dapat memilih dan juga melantik manajer yang berkerja untuk kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki wewenang dalam pemilihan manajer. Pada Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga atau grup tertentu, direktur non eksekutif umumnya

adalah anggota keluarga atau grup. Struktur kepemilikan keluarga atau grup pada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya transaksi berelasi (Sari dan Sugiharto, 2014).

Transaksi berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan (PSAK No.7 Tahun 2015). Transaksi Berelasi Bukanlah suatu hal yang dilarang. Transaksi berelasi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan *stakeholder* melalui peningkatan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan perusahaan atau grup. Pada beberapa kasus transaksi berelasi sering disalah gunakan untuk mencapai tujuan oportunis atau bisa dikatakan mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non-pengendali dan dapat merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Hal ini disebabkan adanya *conflict of interest* antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali. Dalam Menyikapi hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan salah satu ayat di PSAK yang mengatur tentang transaksi berelasi yaitu PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. IAI mengharapkan dengan disahkannya peraturan PSAK 7 tentang transaksi antara pihak-pihak yang berelasi diungkapkan kedalam laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadi penyalahgunaan transaksi berelasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada berbagai pihak. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) juga telah

membuat peraturan yang mengatur pengungkapan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Menurut Werdhi (2015) transaksi pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengungkapan tersebut merupakan kunci bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan dan memahami dampak transaksi pada perusahaan termasuk adanya transfer kekayaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No.7 tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memastikan laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa keputusan perusahaan telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi.

Good corporate governance juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. *Corporate governance* juga merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

Good Corporate Governance (GCG) juga merupakan komponen penting yang harus ada di dalam perusahaan. Kebutuhan *corporate goverment* timbul berkaitan dengan *agency theory* di sebabkan karena perusahaan menginginkan suatu proses pengawasan terhadap keputusan yang diambil atau

yang dilakukan oleh manajemen agar tidak terjadi penyimpangan.

Menurut Chintya (2014) krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang ada di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten, khususnya belum diterapkan etika bisnis. *Corporate governance* mendorong perusahaan melakukan operasinya secara etis karena dianggap dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* ini akan membawa pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan dari transaksi pihak berelasi yang disalahgunakan sangat tinggi, sehingga pemantauan dan penertiban transaksi pihak berelasi adalah menjadi prioritas utama reformasi *corporate governance* di Indonesia. Komite audit merupakan salah satu unsur dari *corporate governance*. Menurut Sutedi (2012) mengatakan bahwa komite audit harus dapat memastikan bawah perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum, serta memastikan perusahaan telah menjalankan usaha secara etis dan bermoral. Unsur *corporate governance* lainnya adalah komisaris independen. Di mana dengan adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran komisaris sehingga dapat terwujudnya *good corporate governance* perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukan murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun (Dananjaya, 2014).

Sari (2014) menyebutkan bahwa perusahaan memiliki tiga motivasi mengapa mereka melakukan transaksi pihak berelasi. Pertama digunakan untuk meminimalkan biaya transaksi (Cook.1997 dan Fishman dan Khanna.1998). Kedua digunakan untuk memanipulasi laba (Jian dan Wong, 2003; Aharony et al.,2009). Ketiga untuk tujuan *tunneling* (Cheung et al., 2009a; Cheung et al., 2009b; Cheung et al., 2006). Motivasi kedua dan ketiga tersebut merupakan motivasi oportunistik atau bisa dikatakan motivasi yang mementingkan diri sendiri.

Terkait dengan motivasi yang ketiga di mana tujuannya *tunneling* yang merupakan motivasi oportunistik di mana transaksi pihak berelasi dapat digunakan sebagai *tunnel* untuk mentransfer sumber daya keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non-pengendali. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan mendorong terjadinya konflik kepentingan di perusahaan. Transaksi berelasi yang mengarah pada tujuan oportunistik juga diharapkan dapat diminimalkan dari dalam perusahaan melalui Komite Audit serta Komisaris Independen yang merupakan bagian penting dalam penerapan *good corporate governance* di perusahaan melalui pengawasan lebih dan membatasi perilaku oportunistik manajer, serta memastikan pengungkapan transaksi berelasi yang lebih transparan.

Adanya pengungkapan transaksi berelasi yang diatur dalam PSAK No.7 tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan melaporkan dengan rinci transaksi berelasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan, agar

memudahkan penggunaan laporan keuangan dapat menilai transaksi tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut penelitian yang tidak konsisten yaitu tentang bagaimana pengaruh komite audit, komisaris independen dan struktur kepemilikan terhadap transaksi berelasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti buat, maka peneliti ingin meneliti mengenai penungkapan transaksi pihak berelasi, khususnya mengenai pengaruh *Corporate Governance* yang dijabarkan dalam 2 unsur yaitu komite audit dan komisaris independen dan pengaruh Struktur Kepemilikan berkaitan dengan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No.7 maka peneliti memilih judul **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan PSAK No.7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah komite audit, komisaris independen, dan struktur kepemilikan secara bersama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi ?
4. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan transaksi pihak berelasi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.
3. Untuk mengetahui apakah komisaris independen mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.
4. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Diharapkan peneliti ini dapat menambah wawasan mengenai laporan keuangan, khususnya laporan terkait pengungkapan transaksi berelasi yang diharapkan akan dapat membantu dikemudian hari.

Merupakan suatu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah khususnya pada masalah

yang diteliti terkait dengan pengungkapan transaksi berelasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian yang sejenis berkaitan dengan pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi terkait pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi pada laporan keuangan.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor serta stakeholder dalam mengambil keputusan terkait pada suatu entitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel komite audit, komasaris independen, struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Setelah dilakukan analisis data dan interpretasi hasil diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.
2. Variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan transaksi berelasi.
3. Variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan transaksi berelasi.
4. Variabel struktur struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan transaksi berelasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan, diantaranya :

1. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai uji koefisien determinasi menjadi kecil yakni 17,4 % yang artinya 82,6 % masih dipengaruhi oleh variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI, sehingga generalisasi penelitian dibatasi hanya pada perusahaan pertambangan dan pertanian.
3. Penggunaan periode pengamatan tahun 2017-2018 ini relatif pendek mengingat hasil yang akan didapatkan dengan rentangan waktu yang panjang akan lebih akurat dibandingkan rentang waktu yang pendek.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di atas maka diharapkan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian seperti ukuran akuntan publik dan kepemimpinan manajemen.
2. Populasi dan sampel dalam penelitian selanjutnya sebaiknya diperluas lagi, tidak hanya perusahaan sektor utama saja tetapi perusahaan sektor lainnya seperti perusahaan manufaktur dan sektor lainnya.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dari pada periode pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUTAKA

- Agnes, A. (2017). Peranan good corporate governance untuk menekan manipulasi laba: studi mengenai transaksi pihak berelasi. *CALYPTRA*, 6(2), 310-324.
- Ahmad, R., & Sari, R. C. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2).
- Apriyani, H. W. (2016). Pengaruh corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan transaksi pihak berelasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(1), 36-50.
- Azwar, Saifuddin.(2010). Metode Penelitian, Yogyakarta.Pustaka Penerbit
- Bursa Efek Indonesia. 2019. Laporan Keuangan dan Tahunan.(<http://www.idx.co.id>) diakses 10 desember 2019.
- Chrisdianto, B. (2013).Peran komite audit dalam good corporate governance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 1-8.
- FCGI. 2001. *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II, Edisi 2.
- Ghozali, I. (2006). Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram iIBM SPSS 21*. <https://doi.org/10.1126/science.1158668>
- Jensen, N., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. *Journal of Financial Economics*.
- Juvita, D., & Siregar, S. V. (2013). Pengaruh corporate governance terhadap hubungan besaran dan pengungkapan transaksi pihak berelasi dengan manajemen laba: studi empiris perubahan PSAK No. 7. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 45-67.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*.
- Harijanto, V. N. A. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Psak No 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1).
- Ikatan Akuntaansi Indonesia, 2018, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Selemba Empat.
- Marpaung, W. M. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empirik pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015).

- Nugroho, A., & Sugiyanto, E. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen Dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nuryaman . Veronica C.2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Bisnis*. Bogor . Ghalia Indonesia
- Pitasari, A., & Septiani, A. (2014). Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 132-140.
- Pratista, A. R. H. (2019). Pengaruh Corporate Governance Pada Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 7 TAHUN 2015. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1).
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*.
- Sari, Ratna Candra dan Sugiharto. 2014. *Tunneling dan Corporate Governance*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saham.O.2019.Sektor Utama BEI 2017-2018. (<https://www.saham.ok.com>) diakses pada 10 Desember 2018
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Tarapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. CV. Andi Offest Edisi Pertama. Yogyakarta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Utama, C. A. (2015). Penentu besaran transaksi pihak berelasi: Tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 37-54
- Widyati, M. F. (2013). Pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Jurnal ilmu manajemen*, 1(1), 234-249.
- Wibowo, Rocky putra . 2018 .*Pengaruh Komite Audit,Komisaris Independen, Dan Ukuran Kantor akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7*. Skripsi. Universitas Negeri Yonyakarta.
- Widarto. 2013. *Penelitian Ex Post Facto*. Universitas Negeri Yogyakarta.